Forum Freedom 8, 11 Juli 2005

Tema: Demokrasi

Nara sumber : Saiful Mujani

Petikannya:

Bagaimana kaum liberal Indonesia mengkaji berbagai masalah nyata yang ada di tengah kita? Freedom Institute bekerja sama dengan radio 68H sajikan Forum Freedom..

Hamid Basyaib (HB) : Selamat pagi Saudara, kita berjumpa lagi dalam acara Forum Freedom. Kerja sama antara Freedom Institute dengan Radio 68-H. Dan, pagi ini saya, Hamid Basyaib, kedatangan tamu Dr. Saiful Mujani. Selamat pagi, Saiful!

Saiful Mujani (SM): Pagi Hamid.

HB : Dr. Saiful Mujani adalah, dia punya banyak jabatan: Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI), Periset senior di Freedom Institute, dan banyak sekali melakukan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan demokrasi. Dan, disertasinya sendiri masih menyangkut demokrasi dikaitkan dengan kaum muslim.

Anda bisa menghubungi telepon (021) 70497497, Anda bisa berkomentar, SMS, dan lain sebagainya di nomor tadi. Dan, pada kesempatam-kesempatan berikutnya bisa kita bahas atau jawab pertanyaan Anda itu.

Saiful, kita mulai dari yang paling sederhana. Orang memahami demokrasi itu yang paling sederhana, yang hampir diketahui oleh semua orang, adalah sebuah pemerintahan yang dirumuskan sebagai "dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat". Nah, juga, orang membedakan antara "demokrasi substantif" dan "demokrasi prosedural". Jadi, yang sering diinginkan oleh mereka yang tidak puas, biasanya kalau demokrasi itu secara prosedural sudah terpenuhi, tetapi secara substansinya belum, hal-hal semacam itu. Apa sih sebetulnya demokrasi itu? Mengapa demokrasi itu dianggap perlu dan jadi patokan standar di hampir semua negara di dunia ini?

SM : Baik, yang pertama tadi mengenai definisi demokrasi yang Anda ungkapkan dan mungkin mewakili pandangan umum di masyarakat, pemerintahan; berasal

oleh dan untuk rakyat, itu sebenarnya definisi yang problematik dalam kenyataan yang hidup di masyarakat. Boleh disebut itu sebuah definisi yang lebih normatif sifatnya, bukan definisi yang betul-betul mengacu kepada sebuah entitas riil, kenyataan yang ada di dalam masyarakat.

Kenapa demikian? Karena kenyataannya rakyat itu tidak memerintah. Rakyat itu kadang-kadang, dalam praktiknya, dalam demokrasi juga tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Oleh karena itu, dalam kenyataan, kalau kita memahami demokrasi secara riil yang ada di dalam sejarah umat manusia di manapun, terutama yang modern sekarang, karena sebelum zaman modern praktik demokrasi itu tidak ada, termasuk di Yunani kuno dulu, itu kota namanya, dan sebetulnya bukan demokrasi yang sebenarnya. Demokrasi seperti yang kita kenal sekarang ini relatif baru, produk abad 19/abad 20 lebih spesifik lagi. Nah, pengertian demokrasi sekarang ini, itu sebenarnya mengacu pada prosedur, pada cara rekrutmen orang untuk mengisi jabatan-jabatan strategis publik, dengan melibatkan paritispasi masyarakat seluas mungkin. Jadi, itu yang khas dalam demokrasi itu adalah prosedur. Kalau tadi ada yang menyebut demokrasi itu dibedakan antara demokrasi prosedural dengan demokrasi substantif, istilahnya itu hanya mengulang kata ketika disebut prosedural itu. Demokrasi memang sebetulnya prosedural. Dengan sendirinya prosedur.

Nah, kalau dikontraskan dengan demokrasi substantif itu sebenarnya istilah untuk merespons pandangan-pandangan atau gagasan-gagasan yang di luar demokrasi sebenarnya. Misalnya, mereka bicara bahwa demokrasi itu adalah, yang definisi umum tadi, bahwa kekuasaan oleh rakyat dan rakyat yang dimaksud adalah kelas bawah. Oleh karena itu kemudian, demokrasi itu adalah sebuah prosedur untuk mencapai tujuan dan kepentingan masyarakat bawah, yang itu digambarkan sebagai kelas bawah di dalam masyarakat. Nah, gambaran seperti ini dalam praktiknya diwujudkan misalnya ternyata di dalam sistem komunisme. Sistem komunis itulah, dalam versi ini, sebetulnya demokrasi, satu versi dari demokrasi substantif. Karena, sebenarnya ketika kita bicara tentang substansi, itu lebih mengacu kepada produk, pada isu, pada policy, pada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Apakah lebih berorientasi kepada rakyat kebanyakan, pada kelas bawah, atau pada masyarakat pada umumnya. Lepas dari kelasnya apa. Nah, itu lebih pada preferensi kebijakan bukan esensi dari demokrasi itu sendiri.

Karena apa? Karena, orang bisa membuat sistem yang mengacu kepada kepentingan orang banyak, tanpa harus berdemokrasi. Misalnya, sebut saja Singapura. Singapura itu bukan negara demokrasi, tetapi negara otoritarian. Tapi pemerintahnya sangat mengacu kepada kepentingan orang banyak; hukum jalan dengan baik, korupsi tidak ada, dan seterusnya. Tapi negara itu bukan negara demokrasi. Kenapa? Karena prosedur untuk rekrutmen pejabat-pejabat publik tidak dilakukan dengan partisipasi orang banyak. Itu yang membuat dia bukan demokrasi di dunia sekarang ini. Lain halnya dengan India misalnya. India, walau masyarakatnya miskin, compang-camping dan seterusnya itu disebut demokrasi. Karena apa? Karena prosedur untuk rekrutmen pejabat-pejabat publiknya tadi itu dilakukan dengan partisipasi masyarakat seluas-luasnya.

Ketika kita bicara tentang partisipasi, di situ mensyaratkan hal yang sangat fundamental: adanya kebebasan. Jadi, demokrasi itu fondasinya kebebasan. Tidak mungkin demokrasi tanpa kebebasan. Kebebasan dalam hal ini, pertama-tama, kebebasan untuk ikut serta berpartisipasi masyarakat biasa.di dalam memilih pejabat-pejabat publik tersebut-di samping rakyat sendiri, tentu saja, atau individu-individu yang ada di masyarakat, lepas dari kelasnya apa, lepas dari agamanya apa, punya hak untuk dipilih juga. Dalam kenyataannya, misalnya yang menang adalah elite, itu lain hal lagi persoalannya. Dalam kenyataannya adalah, yang menguasai untuk resources, untuk menguasai jabatan-jabatan publik tersebut tidak bisa dipisahkan dari elite tadi. Elitelah yang kemudian mengisi kesempatan-kesempatan itu. Itu dalam sejarahnya demokrasi. Jadi kalau dikatakan bahwa rakyatlah yang berkuasa, itu problematik, itu terlalu normatif, tidak rill dalam sejarah demokrasi.

HB : Nah, itu juga masalahnya. Kalau Anda menyebut bahwa demokrasi itu, pertama, demokrasi itu dengan sendirinya prosedural, ya jadi itu dalam istilah bahasanya pleonasme ya, redanden. Nah, tapi di situ pula kritik orang, terutama mereka yang berhaluan kiri, yang berhaluan populistik, yang sosialistik atau komunistik. Yang mengkritik bahwa demokrasi prosedural itu dengan sendirinya jadi tidak adil. Karena itu tadi, Anda bilang, mereka preferensinya adalah mengakomodasi suara masyarakat bawah, sementara dalam demokrasi yang dengan sendirinya prosedural itu suara rakyat bawah itu sering tidak didengar. Yang muncul yang dapat jabatan, yang kepentingan-kepentingannya bisa diagregasikan. Itu adalah mereka yang punya resources yang barusan Anda singgung itu. Bagaimana Anda memecahkan persoalan ini?

SM : Persoalan itu terpecahkan lewat persaingan antara elite itu sendiri. Karena masing-masing elite punya kebutuhan legitimasi dan dukungan. Oleh karena itu, kompetisi antara elite itu akan melahirkan kompetisi program, kompetisi agenda, dan seterusnya. Karena dia membutuhkan dukungan dari publik yang sangat luas, maka demokrasi inheren di dalamnya nanti itu akan melahirkan program-program yang populer. Kalau tidak, dia tidak akan dipilih oleh masyarakat.

Oleh karena itu, demokrasi di situ memberikan ruang, memberikan prosedur untuk persaingan. Nah, adanya persaingan tadi mensyaratkan adanya kebebasan. Dengan demikian kemudian, dengan adanya persaingan tersebut, maka terbukalah pilihan-pilihan. Pilihan yang paling baik adalah yang populer di masyarakat. Nah, oleh karena itu kemudian, dengan sendirinya, maka demokrasi tersebut harus memperhatikan masyarakat. Bukan berarti, dengan sendirinya dan secara riil, bahwa semua masyarakat kemudian akan berkuasa, tidak.

Dalam kenyataannya adalah masyarakat itu komponen yang memungkinkan adanya persaingan-persaingan di antara elite menjadi terbuka dan kemudian memberikan opsi-opsi yang lebih banyak untuk memperbaiki satu sistem, untuk membuat policy atau kebijakan-kebijakan yang lebih baik dengan adanya

prosedur tersebut. Kalau tidak ada prosedur itu, maka alternatif-alternatif, cara-cara kita untuk mencari kemungkinan-kemungkinan yang lebih baik kemudian menjadi tertutup. Tidak ada demokrasi yang akan menghasilkan kebijakan sekali jadi. Tidak ada. Yang ada itu adalah rumusan-rumusan yang sangat romantis seperti yang dibangun dalam sistem komunisme, di mana dibayangkan masyarakat tanpa kelas misalnya agendanya, oleh karena itu kemudian dibenarkan adanya diktator proletariat, karena itu hanya sementara sifatnya. Dia membuat klaim, seolah-olah Lenin, seolah-olah Marx, seolah-olah Mao itu merepresentasikan kepentingan masyarakat. Padahal, masyarakat itu adalah masyarakat yang dia bayangkan, bukan masyarakat yang sesungguhnya. Nah, dalam praktiknya kemudian, kita lihat bahwa yang terjadi, tujuan mulia tersebut adalah suatu bencana besar bagi umat manusia dalam sejarah. Komunisme adalah satu sistem yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, dan kita tahu itu, sudah ambruk di mana-mana.

HB : Jadi, maksud Anda adalah mungkin bagi elite, karena dia membutuhkan legitimasi dari rakyat dan rakyat itu, misalnya dalam kasus Indonesia sebagian besar masih merupakan kelas bawah, maka adalah mungkin walaupun dia elite, bukan orang bawah sendiri, memperjuangkn kepentingan-kepentingan orang bawah?

SM : Persis. Tapi jangan lupa dalam demokrasi, saya melihatnya secara riil, bukan secara normatif, adalah bahwa elite sendiri itu bukan dia orang yang punya hati bersih.

HB : Semata-mata karena membutuhkan legitimasi, ya?

SM : Dia membutuhkan dukungan, membutuhkan legitimasi, pembenaran dari masyarakat. Bukannya dia malaikat yang mau membantu rakyat, bukan. Tidak ada secara riilnya yang seperti itu.

HB : Ada lagi masalah lain. Elite lama yang agak ragu-ragu melihat demokrasi, dianggap terlalu liar dan sebagainya, lalu menganggap bahwa demokrasi itu adalah sebetulnya milik budaya Barat, hanya karena misalnya datangnya pun, asal usulnya dari Yunani. Lalu, sekarang yang paling banyak mempraktikkannya adalah negara-negara Barat. Seberapa jauh ini, anggapan semacam ini bisa dibenarkan?

SM : Kalau melihat secara sejarah, saya kira ada benarnya. Bahwa gagasan dan praktik demokrasi itu berasal dari Barat. Itu harus diakui, tidak bisa dipungkiri. Dalam sejarah, kenyataannya seperti itu. Tapi, apakah sesuatu yang datang dari Barat, kebetulan peradaban Barat, atau wilayahnya ada di Barat misalnya, apakah sesuatu yang dengan niscaya itu sebagai sesuatu yang tidak ada manfaatnya bagi peradaban lain, tidak akan cocok dengan peradaban lain? Itu pertanyaannya. Sama hal misalnya dengan

hal-hal ilmu pengetahuan dan teknologi atau komputer atau agama. Agama juga, misalnya agama kita yang mayoritas agama Islam, dari Barat sebenarnya. Dan dalam pengertian itu, Barat dalam pengertian di luar negeri kita. Baratlah Timur Tengah itu, dari posisi negeri kita.

Jadi, menurut saya, bukan persoalan Barat dan Timur atau Utara dan Selatan, tapi persoalannya adalah sejauh mana hasil dari sebuah peradaban itu berguna atau dipandang bisa membantu untuk memperbaiki kehidupan kita, terutama dalam hal ini, kehidupan politik. Nah, tidak ada sistem di manapun sekarang ini di dunia, yang dipandang dan dinilai oleh masyarakat, sekarang ini, yang lebih praktis dan lebih mungkin membantu kita untuk mencapai tujuan-tujuan masyarakat tersebut, selain demokrasi. Itu sekarang setidak-tidaknya, sejauh ini.

Karena apa? Kalau dulu, mungkin sistem kerajaan dan sebagainya, atau dalam Islam ada khilafah dan seterusnya, karena relatif masyarakatnya itu lebih sederhana, jumlahnya lebih sedikit, bisa dikelola dengan mudah. Nah, bentuk-bentuk masyarakatnya juga budayanya, sudah berubah. Kalau dulu mungkin relatif homogen; masayarakat itu, warga itu tidak ada. Mungkin yang ada subjek, kawula, bukan warga negara, bukan citizen. Sementara dalam proses sejarah, citizen itu lahir. Tanda-tanda citizen adalah anggota masyarakat yang relatif punya aspirasi, punya keinginan, dan bisa mengambil keputusan sendiri dan relatif otonom itu lahir. Lepas dari peradabannya di mana. Tentu saja ada evolusi sejarah di situ. Ada wilayah-wilayah tertentu yang lebih cepat proses terjadinya, dan ada wilayah yang tidak. Tentu saja, itu persoalan sejarah.

Nah, dengan lahirnya citizenship atau citizen yang semacam ini, warga negara yang semacam ini, maka itu tidak bisa lagi diakomodasi oleh sistem yang bukan demokrasi. Demokrasilah yang bisa mengakomodasi itu. Apabila itu tidak diakomodasi dengan demokrasi, maka yang akan terjadi adalah kekerasan. Jadi, ada aspirasi untuk berpartisipasi kemudian direpresi, kalau sistemnya bukan demokrasi. Kemudian yang terjadi adalah kekerasan, penindasan, oleh negara, terhadap anggota masyarakat tersebut. Maka di situlah kemudian hal-hal yang tidak kita inginkan bisa terjadi. Misalnya, di kawasan Asia dulu. Masih ada sekarang seperti di Birma misalnya, hal semacam itu masih terjadi. Di kawasan Timur Tengah misalnya, hal semacam itu masih terjadi. Tapi, perlahan-lahan, dan kita yakin di negara-negara Timur Tengah pun mulai terbuka. Di Mesir, sudah dibuat referendum misalnya, belakangan. Bahwa presiden akan dipilih secara langsung. Yordania, sudah mulai terbuka, punya sistem palementer. Walaupun bertahap, arahnya sudah mulai ke sana. Bahwa demokrasi itu memang merupakan tuntutan zaman, tuntutan peradaban manusia. Bukan punya Barat, bukan punya Timur.

HB : Nah, bicara tentang kebebasan, kalau dalam sistem yang non-demokratis Anda barusan bilang yang muncul adalah kekerasan. Artinya, aspirasi tidak diakomodasi. Aspirasi rakyat itu direspon dengan penindasan oleh negara. Nah, persoalannya juga, di dalam demokrasi kekerasan juga meruyak, mungkin bukan oleh negara, tetapi oleh sesama warga negara. Ini

yang menjadi keluhan juga di negara kita Indonesia. Sejak reformasi, kebebasan dibuka, dan orang cenderung bebas, dan kekerasan ada di mana-mana. Apa yang disebut bentrokan horizontal oleh masyarakat dengan masyarakat itu terjadi dalam skala yang bagi banyak orang itu mulai dari tingkat yang mencemaskan, dan oleh karena itu mereka agak cepat-cepat menyalahkan demokrasi itu sendiri?

SM : Sebenarnya kita harus fair. Dulu, tidak terjadi misalnya konflik horizontal dan seterusnya karena direpresi oleh negara, oleh Orde Baru. Sampai kapan negara tersebut akan mampu melakukan itu? Kenyataannya tidak mampu, hancur juga. Oleh karena itu, kebebasan tersebut nggak bisa ditahan. Represi oleh negara itu sendiri merupakan satu bentuk kekerasan sistematis sebenarnya. Cuma, bentuknya itu kekerasan yang vertikal, tidak seperti yang Anda sebutkan tadi. Sementara di dalam demokrasi, kemungkinan kekerasan yang terjadi itu adalah konflik horizontal, yaitu antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lain. Itu betul. Itu terjadi tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di India, juga di negara-negara Eropa Timur yang baru, misalnya di Uni Soviet seringkali terjadi. Apalagi, kalau pembelahan etnik atau agama begitu tajam misalnya. Oleh karena itu, demokrasi itu akan mudah matang, akan mudah mencapai tujuan yang diharapkan, apabila ada komponen-komponen yang tumbuh di dalam masyarakat itu sendiri, yaitu budaya tentang kebebasan itu sendiri. Budaya kebebasan itu.

Kebebasan harus dibedakan dengan anarki. Kebebasan sebetulnya, inheren di dalamnya adalah toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, pluralisme. Itu sebetulnya inheren di dalam kebebasan itu. Tidak ada kebebasan tanpa itu, yang ada adalah anarki. Oleh karena itu, itu menyangkut masalah budaya yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Sejauh mana masyarakat itu sudah siap melihat kebebasan, melihat perbedaan, melihat pluralisme yang tumbuh di dalam masyarakat.

Pada dasarnya demokrasi adalah sistem yang sekuler. Oleh karena itu, kalau demokrasi misalnya disubordinasikan di dalam satu paham tertentu, apakah itu yang sekuler misalnya komunisme, atau yang tidak sekuler, ke dalam paham keagamaan, bukan agama, ke dalam satu paham keagamaan tertentu, maka demokrasi sebagai sebuah prosedur akan macet dengan sendirinya. Nah, oleh karena itu demokrasi harus dibebaskan dari itu. Demokrasi betul-betul, saya kembali kepada definisi awal, sebagai sebuah prosedur. Nah, kemudian nanti prosedur itu akan diisi apa, tergantung nanti siapa yang dipilih oleh rakyat. Elte A punya agenda apa, elite B punya agenda yang lain, nah di situ dikompetisikan. Misalnya A yang mendapatkannya, didukung oleh rakyat, nanti setelah 5 tahun dinilai lagi oleh masyarakat. Apakah agenda-agenda A tersebut bagus atau tidak, dipenuhi atau tidak. Di situ nanti dihukum oleh masyarakat, apakah diteruskan agenda-agenda tersebut. Apabila prosedurnya sendiri tadi tidak dijaga, kemungkinan untuk memperbaiki kesalahan tersebut akan hapus. Nah, disitu terkait kembali dengan kebebasan itu tadi. Jadi, kebebasan adalah suatu fondasi bagi prosedur-prosedur tersebut. Karena, tidak akan mungkin ada kompetisi yang bebas, antara kelompok-kelompok kepentingan di dalam masyarakat, kalau kebebasan itu sendiri, pluralisme, toleransi itu tidak ada. Oleh karena itu, itu prasyarat-prasyarat kultural bagi tumbuhya prosedur demokrasi.

HB : Jadi memang, pasti terkait dengan kultur masyarakat itu. Walaupun kultur itu sendiri sebetulnya menurut Anda bisa dibangun ya, bukan sesuatu yang kinetis atau given?

SM : Ya, bukan sesuatu yang given, yang historical deterministic. Tidak demikian. Kultur itu bisa tumbuh dari proses belajar yang terus-menerus.

HB : Memang butuh waktu?

SM : Kita lihat di Eropa juga, di awal-awal demokrasi itu tumbuh, kekerasan itu terjadi. Di Amerika, sampai sekarang kekerasan itu masih terjadi. To some degree, itu berkurang, bagaimanapun, pada akhirnya. Misalnya demokrasi Amerika tahun 1920-an, berbeda kualitasnya dengan demokrasi sekarang. Atau di Perancis misalnya, dia memulainya dari revolusi, di situ ada kekerasan. Kayak kita juga di sini, memulai demokrasi sejak runtuhnya Soeharto; terjadi konflik, terjadi penjarahan dan seterusnya. Awalnya seperti itu. Dan, semua masyarakat yang belajar dari pengalaman seperti itu, menyadari bahwa itu tidak benar. Toleransi, bagaimanapun, dibutuhkan untuk membangun sebuah sistem demokrasi. Kenapa demokrasi? Karena lagi-lagi, tidak ada alternatif lain yang lebih baik untuk mengelola perbedaan tersebut selain sistem demokrasi. Kita mau kembali ke mana kalau tidak kembali ke demokrasi.

HB : Jadi Anda mau bilang bahwa apa yang dirisaukan oleh orang sekarang, misalnya kekerasan, keliaran, hukum yang tidak ditegakkan, masih jauh dari sempurna, belum sempurna penegakannya, itu semua adalah harga yang wajar. Harga yang harus dibayar?

SM : Harus dibayar dan dipelajari. Itu semua menjadi bagian dari proses kita untuk menjadi lebih dewasa dalam berdemokrasi.

HB : Maksud Anda, kalau saja demokrasi ini misalnya dimulai sejak 30 tahun yang lalu, jadi waktu misalnya Jenderal Soeharto dulu sungguh-sungguh mau memulai, mungkin keadaaannya sekarang tidak akan seburuk ini, ya?

SM : Ya, mungkin. Itu kan pertanyaan spekuasi, pengandaian. Tapi, saya percaya bahwa kebiasaan toleranasi, menerima pluralisme, dan seterusnya itu adalah hasil dari sebuah proses yang tidak mudah, tentu saja. Tapi harus ada di dalamnya perjuangan ke arah itu. Jadi, di sini bedanya demokrasi dengan sistem misalnya otoritarianiasme.

HB: Nah, ini. Kita masuk ke sini. Apa bedanya, dan di mana baik buruknya demokrasi dibanding sistem-sistem lain?

SM : Demokrasi itu, pertama-tama bisa menumbuhkan, terutama bagi yang pemula dalam melakukan demokrasi, ketidaksabaran masyarakat; terlalu bertele-tele, bertengkar, berdebat panjang sekali. Itu demokrasi. Itu mungkin aspek kekurangannya kalau mau dilihat dari sisi bahwa pemerintahan harus efisien dan harus efektf. Di lihat dari sisi itu. Tidak bisa, misalnya, lagi-lagi contoh kesayangan saya adalah Singapura, di sana pemerintahannya sangat efektif, sangat cepat. Tapi pemerintahannya bukan demokrasi. Itu satu.

Kedua, demokrasi juga tidak menjamin akan mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan oleh masyarakat umum itu secara persis. Yang terjadi dalam demokrasi adalah sebuah pergumulan yang terus menerus, tawar-menawar terus menerus, trial and error, tidak ada yang sempurna di dalamnya, banyak sekali celah, banyak sekali lubang, yang membutuhkan waktu yang panjang untuk menutupnya, untuk belajar memperbaikinya dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, itulah hal-hal yang harus disadari betul, bahwa demokrasi bukanlah pekerjaan yang gampang. Tidak ada janji-janji yang mudah dipenuhi. Janji-janji muluk, misalnya dalam demokrasi ada calon yang berkampanye, dia menjanjikan ini menjanjikan itu. Dalam praktiknya itu tidak gampang. Tetapi masyarakat harus sadar itu bagian dari bargaining yang saya sebut tadi di awal, bahwa itu adalah bargaining dari elite-elite politik yang bersaing. Tapi kemudian, kalau terus-menerus seperti itu, bahwa janji-janji tidak dipenuhi dan seterusnya, itu juga bisa mendelegitimasi demokrasi itu sendiri. Nah, oleh karena itu, ada tuntutan terhadap elite itu sendiri untuk memenuhi syarat minimal dari janji-janji tersebut, setidak-setidaknya menurut penilaian masyarakat. Bahwa apa yang dijanjikan tersebut dicapai, walaupun tidak sepenuhnya. Nah, itu akan memperkuat demokrasi itu sendiri. Bila tidak, legitimasi demokrasi tersebut kemudian menjadi lemah, dari sisi masyarakat.

HB : Baik, ini sepatah kata saja dari Anda. Apa Anda optimistis terhadap masa depan demokrasi?

SM : Saya sangat optimis.

HB : Terima kasih. Pendengar, demikian Forum Freedom pagi ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya, Hamid Basyaib, wassalam!

Tanggapan:

0811149916: Acara freedom ini bagus. Mengupas dan menjelaskan tema-tema seperti demokrasi ini dengan sederhana sehingga gampang dicerna.